

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN  
NAFKAH OLEH ISTRI  
(Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan  
Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi  
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Oleh :  
Andika Aditia Putra  
NPM : 1621010231**

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**



**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2021M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN  
NAFKAH OLEH ISTRI**

**(Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan  
Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Oleh :**

**Andika Aditia Putra  
NPM : 1621010231**

**Jurusan: Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**

**Pembimbing I : Sucipto, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2021M**

## ABSTRAK

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan seseorang atas orang yang menjadi tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan pokok yang diperlukan. Dalam hukum Islam apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka timbulah akibat yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Apabila seorang suami melalaikan kewajibannya maka istri berhak menuntut suami, dalam arti untuk menuntut nafkah pun tidak yang berlebihan, bukan untuk hidup mewah tetapi sesuai dengan kebutuhan kemampuan suami. Hal inilah yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tuntutan nafkah istri terhadap suami di Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tuntutan nafkah oleh istri terhadap suami di Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tuntutan nafkah istri terhadap suami di Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, serta untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam tentang tuntutan nafkah oleh istri terhadap suami.

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (*Field Research*), dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Dan penelitian ini bersifat *Deskriptifanalitik*. Sumber data berupa sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa/tempat tersebut. Sedangkan sumber data skunder, yaitu yang mendukung sumber data primer yang diperoleh dari Al-Quran, hadis, buku-buku dan literatur yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan.

Hasil dari penelitian ini dapat dikemukakan bahwa tuntutan nafkah yang terjadi di Desa Tanjung Baru Timur menuntut untuk dapat dibelikan rumah, di lain hal meminta untuk mengontrak dan tuntutan lainnya yaitu meminta agar dikuliahkan anaknya serta tuntutan atas harta sebagai pegangan di hari kelak jika kesulitan ekonomi. Tuntutan tersebut diperbolehkan, tetapi nafkah harus dipenuhi yang pokoknya saja dan sesuai dengan kemampuan dari suami. Sedangkan dalam hukum Islam nafkah adalah kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri, apabila seorang suami melalaikan kewajibannya dalam menafkahi istri maka istri berhak menuntut suami. Dalam hukum Islam bahwa istri berhak atas harta suami hanya secukupnya maka, tuntutan nafkah pun tidak boleh yang berlebihan, tapi hidup sesuai kebutuhan dan kesanggupan suami tersebut.

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Andika Aditia Putra

Npm : 1621040049

Jurusan/Prodi : *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah* (Konsentrasi Ilmu Hukum)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bahkan duplikasi saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusunan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 07 Desember 2020

Penulis



Andika Aditia Putra

1621040049





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratminto, Sukarame, Bandar Lampung Telp. (0721) 703289*

**PERSETUJUAN**

**Nama** : Andika Adhika Putra  
**NPM** : 1621010231  
**Jurusan/Prodi** : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)  
**Fakultas** : Syariah  
**Judul Skripsi** : Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah  
Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur  
Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung  
Utara)

**MENYETUJUI**

**Untuk di Munaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah**  
**Fakultas Syariah Uin Raden Intan Lampung**

**Pembimbing I**

**Sucipto, S.Ag., M.Ag.**  
**NIP. 196612271995031001**

**Pembimbing II**

**Ahmad Burhanuddin, M.H.I.**  
**NIP.**

**Mengetahui**

**Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah**

**H. Rohmat S.Ag., M.H.I.**  
**NIP. 197409202003121003**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN**  
**LAMPUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol Hendro Suratmin, Sukurame, Bandar Lampung, Telp. (0721) 703289

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul : **Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**, disusun oleh **Andika Aditia Putra NPM. 1621010231** Jurusan **Ahwal Syakhsyah** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada hari/tanggal:

**TIM PENGUJI**

Ketua : **Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A.**

Sekretaris : **Ahmad Sukandi, M.H.I**

Penguji I : **Dr. Hj. Linda Firdawaty, S.Ag., M.H.**

Penguji II : **Sucipto, S.Ag., M.Ag.**

Penguji III : **Ahmad Burhanuddin, M.H.I**



Mengetahui,  
Dean Fakultas Syariah

**Ahmad Burhanuddin, M.H**

NIP. 196210221993031002



## MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا  
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ  
قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا أَنْتَ  
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (mereka berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebaskan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebaskan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. beri ma'afilah Kami; ampunilah Kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, Maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

(Q.S Al-Baqarah: Ayat 286)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi sederhana ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang dan hormat yang tak terhingga kepada :

1. Kedua orang tuaku yang tercinta Bapak Mualimin dan Ibu Darleni yang senantiasa selalu mendo'akan dalam setiap waktunya selalu memberikan semangat, nasehat bimbingan, perhatian serta dukungan. Semoga kelak anakmu ini dapat menjadi anak yang membanggakan untuk kalian berdua dan semoga Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat.
2. Teruntuk kedua adikku Dino Okta Rahmadan dan Bayu Septa Virguna yang telah memberikan support selama aku kuliah. Semoga kita dapat menjadi anak yang membanggakan kedua orang tua.
3. Teman-temanku yang setiap saat selalu memberikan dukungan.
4. Almamater kebanggaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung semoga ilmu dan gelar yang saya dapatkan dikampus ini kelak menjadikan ku manusia yang bermanfaat serta berkah dan diridhoi Allah SWT. Amin



## **RIWAYAT HIDUP**

Andika Aditia Putra, dilahirkan di Tanjung Baru pada tanggal 12 April 1999. Anak pertama dari 2 bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Muallimin dan Ibu Darleni.

Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 1 Tanjung Baru Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan selesai pada tahun 2010, dilanjutkan dengan pendidikan sekolah menengah pertama (SMP) Negeri 1 Bukit Kemuning, selesai pada tahun 2013, selanjutnya melanjutkan studi pada sekolah menengah kejuruan (SMK) Negeri 1 Bukit Kemuning dan menyelesaikan pendidikannya di tahun 2016, dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I Tahun Akademik 1438H/2016M.

Bandar Lampung, 22 Desember 2020

**Andika Aditia Putra**  
NPM. 1621010231

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan atas segala nikmat-nikmat yang telah dikaruniakan kepada saya, baik nikmat kesehatan, ilmu, semangat dan petunjuk, sehingga skripsi dengan judul **“Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”** Karya ilmiah ini disusun guna melengkapi serta memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga (Konsentrasi Ilmu Hukum) di UIN Raden Intan lampung.

Shalawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Al Uswatun Hasanah* Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabat dan ummatnya yang *Insyah Allah* selalu melanjutkan dakwah beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini disusun sebagai tugas dan persyaratan untuk menyelesaikan studi program (S1) Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar sarjana (S.H). Dalam pembuatan skripsi ini peneliti banyak sekali menerima bantuan dari semua pihak, oleh karena itu melalui tulisan ini peneliti mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. Moh. Mukri., M.Ag. Beserta jajarannya.
2. Dekan Dr. KH. Khairuddin Tahmid, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.



3. Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Rohmat, S.Ag.,M.H.I serta sekretaris jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Dr. Abdul Qodir Zaelani, M.A. di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yang penuh kesabaran memberikan bimbingan serta pengarahannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Pembimbing I Sucipto, S.Ag.,M.Ag. Dan Pembimbing II Ahmad Burhanuddin, M.H.I. yang memberikan banyak pengetahuan, masukan serta bimbingan dengan penuh kesabaran demi terselesainya skripsi ini.
5. Petugas perpustakaan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan UIN Raden Intan Lampung dengan penuh kesabaran dan izinnya untuk proses peminjaman buku demi terselesainya skripsi ini.
6. Dosen-dosen Fakultas Syar'iah dan segenap civitas akademika UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala Desa serta jajarannya Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
8. Seluruh anggota kelas KIH angkatan 2016.
9. Sahabat-sahabatku Abdul Aziz, Agus Setiawan, Ahmad Rifai, Fajar Muhammad Irsan, M. Fahmi Hafiz, Rahmat Andaya, yang telah memberikan dukungan dan doanya.
10. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.
11. Untuk semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan teman-teman yang ku kenal semasa hidupku. *Jazakumullah* Semoga amal ibadah dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan

mendapatkan imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Saya sadar dan mengakui bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena disebabkan keterbatasan kemampuan ilmu yang dikuasai, untuk itu kritik dan sarannya yang dapat menyempurnakan karya ilmiah ini. Mudah-mudahan hasil penelitian ini bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Amin Ya Robbal ‘alamin.

Bandar Lampung, 22 Desember 2020

Penulis

**Andika Aditia Putra**  
NPM. 1621010231



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
ABSTRAK .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
PERSETUJUAN.....	iv
PENGESAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
DAFTAR TABEL .....	xv

<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Alasan Memilih Judul .....	2
C. Latar Belakang Masalah.....	3
D. Fokus Penelitian .....	6
E. Rumusan Masalah .....	6
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Signifikansi Penelitian.....	7
H. Metode Penelitian.....	7
I. Sistematika Pembahasan .....	12

<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	
A. Nafkah Menurut Hukum Islam .....	14
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	16
2. Kewajiban Nafkah .....	23
3. Syarat- Syarat Pemberian Nafkah .....	29
4. Macam-macam dan Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah .....	31
5. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah .....	44
B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga .....	47
C. Tinjauan Pustaka .....	49

<b>BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN .....</b>	
A. Gambaran Umum Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara .....	

1. Sejarah Singkat Desa Tanjung Baru Timur.....	54
2. Letak Geografis & Monografis Desa Tanjung Baru Timur ..	55
B. Tuntutan Nafkah Wajib Suami Terhadap Istri .....	62
C. Tuntutan Nafkah Oleh Istri Terhadap Suami Di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.....	64

#### **BAB IV ANALISA DATA.....**

A. Tuntutan Nafkah Oleh Istri Terhadap Suami Di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Lampung Utara .....	69
B. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri Di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara .....	75

#### **BAB V PENUTUP .....**

A. Kesimpulan.....	85
B. Rekomendasi .....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Provinsi
2. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol Kabupaten
3. Surat Keterangan Izin Riset Desa
4. Surat Konsultasi Bimbingan
5. Surat Keterangan Wawancara

## **DAFTAR TABEL**

1. Tabel 1. Tinjauan Pustaka
2. Tabel 2. Keorganisasian Aparatur
3. Tabel 3. Jumlah penduduk
4. Tabel 4. Tingkat Pendidikan
5. Tabel 5. Pencaharian Penduduk
6. Tabel 6. Infrastruktur

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Penegasan terkait istilah judul dalam setiap penelitian sangat diperlukan karena hal ini tidak lain adalah untuk menghindari suatu kekeliruan dalam memahami suatu maksud dari judul tersebut. Penelitian dari judul ini adalah **Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**. Yang kemudian mengenai uraian-uraian istilah di atas adalah sebagai berikut:

1. Pandangan adalah hasil perbuatan memandang, memperhatikan, melihat.<sup>1</sup>
2. Hukum Islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan nash Al-Qur'an maupun sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara universal, relevan pada setiap zaman (waktu) dan tempat (ruang) manusia<sup>2</sup>
3. Tuntutan Merupakan suatu yang dituntut berupa suatu hak, (seperti permintaan keras).<sup>3</sup>
4. Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan sebagainya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1011.

<sup>2</sup>Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Moderen*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009), h. 20.

<sup>3</sup>Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cetakan Kedua Edisi IV, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 1507.

5. Istri adalah seorang wanita (perempuan) yang menikah dengan seorang pria, dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri.<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah di atas yang dimaksud oleh peneliti ini adalah guna untuk memahami atas tuntutan nafkah oleh istri terhadap suami ditinjau dari segi hukum Islam di Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.

## **B. Alasan Memilih Judul**

Alasan penulis memilih judul di atas sebagai bahan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Alasan Objektif**

- a. Di zaman yang modern ini, banyak sekali konflik yang terjadi di dalam rumah tangga, seperti halnya nafkah dalam keluarga, nafkah adalah kewajiban suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, dan disamping itu pun banyak juga dari para istri menuntut suami untuk kepentingan keluarga dalam (berumah tangga).
- b. Judul ini merupakan salah satu fenomena yang terjadi di masyarakat yang harus di hindari demi terjalannya keluarga yang sakina, mawadah, warahmah.

---

<sup>4</sup> Muhammad Bagira Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Mizan, 2002), h. 136.

<sup>5</sup> Davit Mulyadi, *Kbbi.Kemdikbud.go.id*, (Jakarta: Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019), diakses dari aplikasi kbbi edisi V



## 2. Alasan Subjektif

- a. Pokok pembahasan skripsi ini relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di Fakultas Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah.
- c. Tersedianya literatur yang menunjang penelitian.

## C. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>6</sup> Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat rukunnya, maka timbullah akibat hukum yang menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga. Dalam sebuah perkawinan mengandung aspek akibat hukum yang bertujuan untuk melangsungkan perkawinan yang di dalamnya saling mendapatkan hak dan kewajiban serta bertujuan untuk mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong, di dalam sebuah perkawinan ada nya tujuan maksud mengharapkan keridhaan Allah SWT.<sup>7</sup> Ikatan perkawinan akan menimbulkan ketenangan batin baik dari wanita dan pria, baik berupa atas materil maupun immateril. Ketika dalam kehidupan berumah tangga, seorang suami yang bekerja guna mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangga, pasti akan membutuhkan peran dari seorang istri guna membantu handle kebutuhan rumah tangga, peran

---

<sup>6</sup>Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 42.

<sup>7</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: CV, Akademika Pressindo, 1995, cet. Ke-2), h. 132.

istri sendiri bersifat pasif, yang mana pada akhirnya akan tercapai keutuhan rumah tangga atas pemenuhan kebutuhan rumah tangga dengan berupa pemenuhan dari nafkah seorang suami.<sup>8</sup>

Pemenuhan nafkah sendiri memang sangat penting bagi suami untuk dipenuhi, sebab itu merupakan kebutuhan dalam berumah tangga, di mana pemenuhan nafkah sendiri bukan hanya saja berupa materil, akan tetapi kebutuhan rohani antara istri maupun suami sendiri, sehingga nafkah sudah jelas diperintahkan oleh Islam untuk dipenuhi oleh suami, sebagaimana yang dijelaskan secara jelas di dalam surat ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya:”hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.

Pada penjelasan ayat di atas, bahwa suami sebagai orang yang wajib memberikan nafkah haruslah memenuhinya sesuai kemampuannya, sebab Allah SWT tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang sudah Allah takdirkan kepadanya.

Atas dasar kemampuan dalam pemberian nafkah, maka secara langsung pemenuhan nafkah suami terhadap istri dan keluarganya, didasarkan pada

---

<sup>8</sup> Wiyanto Suud, *Buku Pintar Wanita-Wanita dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2011), h. 124.

kesanggupan, sehingga kesanggupan tersebut merupakan suatu pembatasan atas suatu nafkah dengan tujuan agar tidak memberatkan suami.<sup>9</sup> Pemberian atas suatu nafkah yang wajib bagi seorang suami jika dirinci secara jelas berupa :

1. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan.<sup>10</sup>

Ketiga ketentuan secara umumnya di atas merupakan nafkah yang dipenuhi oleh suami, akan tetapi di luar ketentuan diatas, dapat saja suami tidak perlu memenuhinya, seperti halnya tuntutan atas pemenuhan wewanggaan dari seorang istri terhadap suami, dari ketentuan atas tuntutan nafkah oleh istri terhadap suami perlu adanya pembatasan nafkah dengan tujuan, agar suami tidak terbebani atas tuntutan nafkah dari istri. Sehingga pembatasan tersebut akan menimbulkan pada batalnya nafkah dari suami terhadap istri, dengan beberapa ketentuan.<sup>11</sup>

Namun di Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara terdapat beberapa keluarga yang mana istri menuntut nafkah atas kebutuhan yang belum mampu terpenuhi atau dipenuhi oleh suami, sebab ketidakmampuan dalam memenuhi istri tersebutlah terjadi

---

<sup>9</sup> Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Fiqh Nafkah (Memahami Kewajiban Memberi Nafkah dalam Islam)*, diakses pada <http://maktabahabiyahya.wordpress.com/> , pada tanggal 12 Januari 2021.

<sup>10</sup> Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cet. Ke 2*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995). h. 156.

<sup>11</sup> Abu Ibrahim Muhammad Ali, *Fiqh Nafkah (Memahami Kewajiban Memberi Nafkah dalam Islam)*, ...., 12 Januari 2021

perselisihan dalam rumah tangga, bahkan ada istri yang meninggalkan suami dengan alasan mencari nafkah, agar dapat terpenuhi kebutuhan tersebut. Sehingga dengan alasan nafkah suami tidak dapat mencegah istrinya hanya karena demi terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Berdasarkan latar belakang di atas penulis akan mengkaji lebih lanjut permasalahan diatas dalam ulasan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)”.

#### **D. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penetapan area spesifik yang akan diteliti, penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara. Penelitian berfokus pada Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah oleh Istri. Dalam penelitian ini peneliti ingin melihat bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tuntutan nafkah oleh istri.

#### **E. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tuntutan nafkah istri terhadap suami di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang tuntutan nafkah oleh istri terhadap suami di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara?



## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apasaja tuntutan nafkah oleh istri terhadap suami di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang tuntutan nafkah oleh istri terhadap suaminya di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

## **G. Signifikasi Penelitian**

Adapun signifikasi penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan bacaan bagi masyarakat khususnya di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung tentang “Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara.)”.
2. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.

## **H. Metode Penelitian**

Metode merupakan aspek yang penting dalam melakukan penelitian. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

## 1. Jenis dan Sifat Penelitian

### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu melakukan kegiatan lapangan tertentu guna memperoleh berbagai data dari informasi yang dilakukan. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari masyarakat Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

### b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subyek yang diteliti.

### c. Populasi dan Sampel

1) Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti atau totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu, yang seluruhnya berjumlah 600 Kepala Keluarga.<sup>12</sup>

Jadi populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi *focus* penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah masyarakat Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

2) Sampel adalah bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Dalam penelitian sampel yang digunakan non random sampling yaitu tidak

---

<sup>12</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta cv, 2011), h, 80.

semua individu di dalam populasi diberi peluang yang sama yang ditugaskan menjadi anggota sampel. Untuk lebih jelasnya teknik non random sampling yang digunakan ini adalah jenis *purposive sampling* yakni pemilihan sekelompok objek di dasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Pengambilan sampel adalah bertujuan untuk memilih responden yang benar-benar tepat, relevan dan kompeten dengan masalah yang akan dipecahkan.<sup>13</sup> Berdasarkan penjelasan di atas, yang menjadi sampel dalam penelitian ini sebanyak 4 pasang suami-istri.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah:

### a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

### b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang mendukung sumber data primer berupa kitab-kitab fiqih Islam, fiqih munakahat, nafkah, hukum

---

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h, 173.

perdata Islam di Indonesia, hukum perkawinan Islam, serta literature lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis saat ini.

### **3. Metode pengumpulan data**

Mengenai pengumpulan data penulis menggunakan metode sebagai berikut:

#### **a. Metode Interview**

Penelitian lapangan ini penulis menghimpun data dengan cara wawancara yaitu interview merupakan suatu dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>14</sup> Pada saat melakukan wawancara penulis berhadapan langsung dengan orang yang diwawancarai dengan mempersiapkan daftar pertanyaan sesuai data yang penulis butuhkan, dan yang penulis wawancarai antara lain Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

#### **b. Observasi**

Yaitu metode pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap suatu penelitian.<sup>15</sup> Mengenai penelitian ini, penulis mengamati objek yang berada Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

---

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 126.

<sup>15</sup>Soeranto Lincoln Arsyad, *Metode Penelitian untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2008), h. 46.



### c. Dokumentasi

Yaitu suatu cara untuk mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku, agenda, surat kabar dan sebagainya. Metode digunakan khususnya dalam memperoleh data tentang demografis dan geografis Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara

## 4. Teknik pengolahan data

Dalam metode pengolahan data ini, penulis menggunakan beberapa cara atau metode yaitu:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data adalah membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuesioner sudah dianggap lengkap, relevan, jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan.

### b. Penyusunan atau Sistematisasi (*contructing/systematizing*)

Penyusunan atau sistematisasi data adalah mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda menurut klasifikasi data dan urutan masalah. Data yang dikumpulkan oleh penulis akan mengurutkan data sesuai dengan permasalahan penelitian ini dan menyesuaikan dengan sistematika penulisan pedoman skripsi yang ada.

## 5. Analisa Data

Penelitian ini diteliti secara kualitatif dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengacu pada penelaahan sebagai atau pengujian yang sistematis mengenai suatu hal dalam rangka keseluruhan reduksi data,

kajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul, maka penulis menggunakan metode deskriptif analisis.

Deskriptif analisis yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan serta dianalisis dan diinterpretasikan lalu kemudian disimpulkan.<sup>16</sup>

### **I. Sistematika Pembahasan**

Guna memberikan gambaran secara umum serta kemudahan dalam menyusun skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara sistematis susunan ini yang terdiri dari lima bab yakni:

**BAB Pertama**, yaitu berisikan pendahuluan, di mana dalam Bab ini, akan diulas yaitu, latar belakang masalah, yaitu berisikan kronologi problematika awal yang muncul sehingga menjadikannya layak untuk dikaji lebih mendalam, kemudian fokus penelitian yaitu fokus pembahasan yang akan dibahas mengenai permasalahan ini, kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, selanjutnya tujuan serta manfaat penelitian, kemudian penelitian terdahulu guna menghindari dari tindakan plagiarisme, selanjutnya metode penelitian dan kemudian masuk ke dalam sistematika pembahasan.

**BAB Kedua**, yaitu berisikan landasan teori, yakni membahas mengenai teori nafkah, di dalam Islam.

---

<sup>16</sup>*Ibid*, h. 51.

**BAB Ketiga,** yakni gambaran umum penelitian yang terdiri dari penjelasan Desa tempat penelitian, serta sistem tuntutan nafkah oleh istri di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

**BAB Keempat,** adalah analisis yang meliputi tuntutan nafkah oleh istri di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara dan tinjauan Hukum Islam tentang tuntutan nafkah oleh istri di Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara.

**BAB Kelima,** yaitu penutup yang berisikan kesimpulan serta saran yang diambil dari abstrak yang bermula dari proses awal hingga pembahasan akhir, sedangkan saran berisikan masukan serta kritik guna menyempurnakan tulisan dari penelitian ini.





## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Nafkah Menurut Hukum Islam**

Nafkah artinya semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami. Selalu menyertainya mengatur rumah tangga mendidik anak-anaknya.<sup>17</sup> Dalam hukum Islam, setelah akad nikah yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahinya.

Ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Quran memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar baik bagi istri nya.<sup>18</sup> Dan bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya.

Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup>M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam Edisi Pertama*, Cetakan Ke 2, (Jaarta: Siraja, 2003), h. 213.

<sup>18</sup>Syekh Muhammad Bin Umar Anwar, *Terjemahan Syara Ukudullul Ujian (Etika Berumah Tannya)*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2000), h. 46.

1. Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ<sup>١٩</sup> وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَى ﴿٦﴾

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>19</sup>

2. Firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ<sup>٢٠</sup> وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَتْهُ  
اللَّهُ لَا يَكْفِ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا



Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 357.

<sup>20</sup> *Ibid*, h. 358.

3. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ  
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ  
نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا  
وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَدَكُمْ فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.<sup>21</sup>

## 1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukum Nafkah

### a. Pengertian Nafkah

Setelah akad nikah, maka suami wajib memberi nafkah kepada istrinya seperti kebutuhan sehari-hari. Salah satu bentuk perlakuan baik

<sup>21</sup>Ibid, h. 57.

terhadap istri adalah pemberian nafkah, pemberian nafkah merupakan kewajiban suami kerana ia sebagai kepala rumah tangga. Kewajiban yang harus di penuhi adalah tanggung jawab sepenuhnya memenuhi kebutuhan keluarga seperti: Makan, pakaian, pengobatan pendidikan, maupun tempat tinggal.

Kata nafkah berasal dari kata *anfaqa* (أنفق), atau Al-Infaq (الإنفاق) yang artinya mengeluarkan suatu untuk kepentingan sesuatu. Jadi nafkah artinya semua kebutuhan-kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makan, pakaian, rumah dan lain-lain. Dalam Ensiklopedia Hukum Islam, nafkah yang artinya pengeluaran yang digunkan seorang untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>22</sup>

Syariat mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami. Selalu menyertainya mengatur rumah tangga mendidik anak-anaknya.<sup>23</sup> Dari ketentuan tersebut bahwa nafkah artinya memenuhi semua kebutuhan rumah tangga yang diberikan suami kepada anggota keluarga sesuai dengan kemampuan.

---

<sup>22</sup>M.Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam Edisi Pertama*, Cetakan Ke 2, (Jakarta: Siraja, 2003), h. 213

<sup>23</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 212

## b. Dasar Hukum Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istri-istrinya, di mana tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini, diantaranya sebagai berikut:

### 1) Dalam Al-Quran

Dalam kajian hukum Islam akad nikah yang sah akan menimbulkan hak dan kewajiban antar suami dan istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari suami yang menikahnya. Sebaliknya di atas pundak suami terletak kewajiban untuk menafkahi istrinya. Dasar hukum memberi nafkah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَسَعَهَا إِلَّا نَفْسٌ تُكَلِّفُ لَا بِالْمَعْرُوفِ وَكَسَوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ لَهُ الْمَوْلُودِ وَعَلَى

Artinya: *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya".*<sup>24</sup>

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan menentukan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadinya pemborosan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>24</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 57.

## 2) Dalam Hadis

Demikian bahwa ketentuan nafkah yang ditetapkan dalam Al-Quran memberikan pemahaman bahwa suami wajib memberikan nafkah keluarganya sesuai dengan kemampuannya serta pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar baik bagi istri, dan bagi orang yang mampu diberi kemudahan rezeki atau mampu harus menafkahi keluarganya sesuai dengan kemampuan yang ada, sedangkan orang yang kurang mampu sesuai dengan keadaannya, diantaranya terdapat dalam hadis berikut:

وَعَنْ حَكِيمِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! مَا حَقُّ زَوْجٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ؟ قَالَ : تُطْعِمُهَا إِذَا أَكَلْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ ، وَلَا تَضْرِبَ الْوَجْهَ ، وَلَا تُقَبِّحْ ، وَلَا تَهْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ . رواه أحمد ، أبو داود ، نساء ، ابن ماجه .

Artinya:”Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, Aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.”(HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’i, Ibnu Majah).<sup>25</sup>

Dari hadis di atas menerangkan kewajiban suami terhadap istrinya untuk memberikan jaminan berupa:

- a. Memberikan nafkah baik berupa sandang, pangan, dan papan
- b. Tidak menyakiti istri, tidak memukul wajah istri

<sup>25</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002 ), h. 303.

- c. Memberikan nafkah batin misalnya, tidak meninggalkan istrinya<sup>26</sup>

### 3) Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri

- a) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga (2) hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam bermasyarakat (3) masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- b) Pasal 80 tentang diputuskan kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing terhadap istri dalam rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama (2) suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama kepada agama, nusa dan bangsa (4) sesuai dengan penghasilan suami menanggung:

---

<sup>26</sup>Mardalis, *Hadis Ahkam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 246.



1. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
3. Biaya pendidikan.<sup>27</sup>

c) Pasal 81 tentang kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masing dalam iddah. (2) tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan harta kekayaan, dan sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta di sesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

d) Pada Pasal 83 dan sampai Pasal 84 tentang kewajiban istri. Pada Pasal 83 di jelaskan (1) kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin pada suami di dalam yang di benarkan oleh hukum Islam. (2) istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Pada Pasal 83

---

<sup>27</sup>Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia cet. Ke 2*, (Jakarta: CV Akademika Presindo, 1995). h. 156.

istri dapat di anggap Nusyuz jika ia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) selama istri dalam Nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya. (3) kewajiban suami tersebut pada ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri Nusyuz. (4) ketentuan tentang ada atau tidak adanya Nusyuz dari istri harus di dasarkan dalam bukti yang sah.<sup>28</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa Islam mengukuhkan hubungan antar suami istri atas dasar mempunyai hak yang wajib di pikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak dan kewajiban dipikul oleh suaminya. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakkan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada istrinya. Kemudian dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberikan nafkah baik lahir dan serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang

---

<sup>28</sup>Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, (Yogyakarta: New Merah Putih, 2009), h. 23.

dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat kerana mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar maupun bekerja.<sup>29</sup>

## 2. Kewajiban Nafkah

Ada beberapa pendapat tentang kewajiban nafkah diantaranya menurut fuqaha, materil dan immaterial diantaranya sebagai berikut :

### a. Menurut Fuqaha

Fuqaha telah berpendapat bahwa diantara hak suami istri atas suami adalah nafkah hidup dan pakaian. Tentang wajibnya nafkah mereka berselisih mengenai empat perkara, yaitu tentang waktu wajibnya nafkah, kadar (besar) nya nafkah, orang yang berhak menerima nafkah, orang yang wajib mengeluarkan<sup>30</sup>

#### 1) Waktu Wajib Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa nafkah baru menjadi wajib atas suami apabila ia telah menggauli atau mengajak bergaul, sedangkan istri tersebut termaksud orang yang dapat digauli, dan suamipun telah dewasa

Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa suami yang belum dewasa wajib memberi nafkah apabila istri telah dewasa. Tetapi jika suami telah dewasa sedangkan istri belum dewasa, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mempunyai dua pendapat

---

<sup>29</sup>Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan 1*, (Jakarta: 2001), h. 44.

<sup>30</sup>Rusyd Ibnu, *Terjemahan Biyadatu'l Mujtahid, Asy Syifa* : Cetakan kedua, (Semarang: 2010), h. 462.

pertama sama dengan pendapat Imam Malik, sedangkan pendapat kedua mengatakan bahwa istri berhak memperoleh nafkah begitupun juga keadaannya<sup>31</sup>

## 2) Besarnya Nafkah

Imam Malik berpendapat bahwa besarnya nafkah itu tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan pendapat, waktu dan keadaan. Pendapat ini juga di kemukakan oleh Imam Hanafi

Imam Syafi'i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya, atas orang kaya dua *mud*, atas orang yang sedang satu *mud*, dan orang miskin satu *mud*. Satu *mud* setara dengan (1,25 kilogram, seperti gendum, beras dan lainnya). Demikian fuqaha telah sependapat bahwa pemberian pakaian itu tidak ada batasnya, sedangkan pemberian makanan itu ada batasnya<sup>32</sup>

## 3) Orang Yang Menerima Nafkah

Fuqaha telah sependapat bahwa nafkah tersebut adalah untuk istri yang merdeka dan tidak membangkang (*Nusyuz*). Jumhur fuqaha berpendapat bahwa istri yang membangkang tidak berhak memperoleh nafkah.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Thalak)*, (Jakarta : Amzah 2011),. h. 216.

<sup>32</sup>Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Al-Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 115.

<sup>33</sup>*Ibid*, h. 143.

#### 4) Orang Yang Wajib Membayar Nafkah

Fuqaha berpendapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada di tempat, kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sehayya dan orang yang berpergian.

Mengenai hamba sehayya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa suami yang berstatus hamba sehayya wajib memberikan nafkah untuk istrinya. Sedangkan Abu Al-Mush berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah, sedangkan Imam Abu Hanafi berpendapat tidak wajib, di putuskan oleh penguasa.

Dan nafkah tidak hanya suatu pemberian yang diberikan seorang suami kepada istrinya, namun juga merupakan kewajiban antara bapak dengan anaknya dan juga memiliki tanggung jawab antara seorang pemilik dan sesuatu yang dimilikinya. Kewajiban nafkah tersebut telah tercantum dalam sumber hukum Islam Al-Quran dan al hadist,<sup>34</sup> diantaranya terdapat dalam surat Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرَضَعْنَ لَكُمْ فَنَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۖ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسُتْرِضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ۖ

<sup>34</sup>Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVII No. 66 (Agustus 2015), h. 381.

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”.<sup>35</sup>

b. Bersifat materil dan immaterial

Tujuan hukum Islam adalah untuk mensejahterakan umat manusia. Tidak terbatas kepada komunitas tertentu atau wilayah yang secara eksklusif untuk umat Islam saja, akan tetapi semua umat manusia dalam permasalahan di dalam kehidupan. Ini dapat diambil kebijakan tersebut berdasarkan ketentuan Al-Quran dan *Hadits*.<sup>36</sup>

Adanya pembagian tugas yang satu mengurus dan mengatur rumah tangga sedangkan yang lain bekerja di luar sesuai dengan batas batas dan tanggung jawab sebagai suami-istri dalam menanggapi tugasnya masing-masing, istri bertugas mengatur dan mengurus rumah tangga memelihara dan mendidik anak-anak, sementara suami bekerja dan berusaha mendapatkan harta dan belanja keperluan rumah tangga. Kewajiban suami terbagi menjadi dua yaitu:

---

<sup>35</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 357.

<sup>36</sup> Marly Chandra, *The Penology of Islamic Criminal Law, Al-Adalah*, Vol 15, Nomor 2, 2018, h. 348.

### 1) Kewajiban suami bersifat materil

Kewajiban suami yang bersifat materil meliputi kewajiban yang bersifat sekali saja dan ada yang terus menerus diberikan kewajiban yang pertama, adalah kewajiban suami untuk memberikan mahar, dimana mahar tersebut juga termasuk dalam rukun pernikahan. Sedangkan kewajiban yang bersifat materil yang kedua, yang bersifat terus-menerus maksudnya adalah pemberian nafkah kepada istri, dimana di sini suami wajib memberikan kewajiban kebutuhan-kebutuhan baik sandang (berupa pakaian yang pantas dan dapat digunakan untuk menutup aurat bagi istri). Pangan yaitu, (pemberian nafkah sehari-hari). Papan yaitu, (tempat tinggal untuk berteduh dan juga kelengkapan dan juga pengobatan untuk menjaga kesehatan dan pengobatan di saat sakit).<sup>37</sup>

### 2) Kewajiban suami bersifat immateril

Dalam buku perkawinan Islam KH. Azhar Basyir, MA. Mengatakan bahwa dalam ayat ini terdapat hak-hak istri yang bersifat immateril yang harus ditunaikan suami, atau dalam kata lain kewajiban suami yang harus di tunaikan yaitu bahwa suami harus menggauli istri dengan cara yang makruf dan berdasarkan dalam hal-hal yang tidak di senangi. Sedangkan menggauli istri dengan cara yang makruf beliau membagi menjadi tiga yaitu:

---

<sup>37</sup>Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Uli Press, 1990), h. 115.



- a) Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf kehidupan dalam bidang-bidang agama, akhlaq dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.
- b) Melindungi dan menjaga nama baik istri.
- c) Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis.<sup>38</sup>

Ada beberapa akibat hukum yang harus dilaksanakan dalam kehidupan suami istri, yaitu ada beberapa macam tentang hak-hak bersuami-istri sebagai berikut:

#### 1. Hak suami

- a. Istri hendak memuliakan dan menghormati suami
- b. Istri dapat bersikap sopan terhadap suami
- c. Istri selalu menaati suami dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan durhaka kepada Allah
- d. Istri harus memenuhi permintaan dan keinginan suami yang mungkin dapat dilakukan
- e. Istri selalu menyertai suami dalam suka maupun duka

#### 2. Hak-hak istri

- a. Suami memberikan nafkah pakaian, dan tempat tinggal dari hasil usaha yang halal dan diperoleh dengan jalan yang halal
- b. Istri dapat bersikap sopan terhadap suami

---

<sup>38</sup>*Ibid*, h. 120.

- c. Istri selalu mentaati suami dalam segala hal, kecuali dalam perbuatan durhaka kepada Allah.
  - d. Suami harus dapat memberikan rasa nyaman kepada istrinya, dan berusaha melindungi dari bahaya seperti mengobati jika sakit
  - e. Suami harus setia bersama istri baik dalam keadaan suka maupun duka.<sup>39</sup>
3. Hak suami-istri
- a. Suami istri tidak saling membuka rahasia masing-masing
  - b. Suami istri hendak saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran
  - c. Suami istri hendak bermusyawarah dalam memutuskan suatu hal
  - d. Kesetiaann cinta dan kasi sayang diantara keduanya.<sup>40</sup>

### **3. Syarat-Syarat Pemberian nafkah**

Dalam pernikahan akan menimbulkan hak dan kewajiban, yang mana kewajiban yang paling krusial adalah tentang nafkah, dalam hal ini perlu di perhatikan syarat-syarat pemberian nafkah kepada istri. Dibawah ini adalah beberapa syarat istri yang berhak menerima nafkah, yaitu:

- a. Sahnya akad nikah.
- b. Mereka bisa diajak bersenang-senang.

---

<sup>39</sup>Noor Syamsuddin, Mutmainah Mutia, *Perkawinan Yang Di Dambakan*, (Jakarta: An-Nuur Press, 2009), h. 71.

<sup>40</sup>*Ibid*, h. 72.

- c. Pindah sesuai dengan yang sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika berpergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.
- d. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinnya bersenang-senang.
- e. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinnya bersenang-senang.<sup>41</sup>

Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka ia tidak wajib dibelanjakan. Karena jika ikatan perkawinannya tidak sah bahkan batal, maka wajiblah suami istri tersebut diceraikan, guna mencegahnya timbul bencana yang tidak dikehendaki. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau suami tidak dapat menikmati dirinya atau istri enggan pindah ke tempat yang dikehendaki suami, maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban belanja.<sup>42</sup>

Selanjutnya menurut Djamaan Nur hak-hak nafkah istri dapat menjadi gugur apabila:

- 1) Akad nikah mereka ternyata batal atau *fasid* /rusak

Misalnya kedua suami istri itu ternyata mempunyai hubungan mahram, haram nikah karena nasab, sesusuan dan sebagainya

- 2) Istri *Nusyuz* (durhaka) yaitu istri tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban suami istri

---

<sup>41</sup>Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 215.

<sup>42</sup>Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet II, (Surabaya: Al-Iklas, 1993), h. 26.

- 3) Istri murtad yaitu istri pindah agama lain
- 4) Istri melanggar larangan-larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti istri meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa seizin suami, atau tanpa izin suami dan tidak disertai oleh mahram dan sebagainya
- 5) Istri dalam keadaan sakit yang oleh karenanya tidak bersedia serumah dengan suaminya, tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya, maka dia tetap berhak mendapatkan nafkah
- 6) Pada waktu akad nikah istri masih belum baligh, dan ia masih belum serumah dengan suaminya. Nabi Muhammad sendiri pada waktu menikah dengan Aisyah, beliau belum serumah dengan Aisyah selama 2 tahun, dan masa itu Rasulullah tidak memberi nafkah kepadanya.<sup>43</sup>

#### **4. Macam-Macam dan Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah**

##### **a. Macam-Macam Nafkah**

Ulama fikih berpendapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, dan tempat tinggal. Nafkah ada dua macam:

##### **1. Nafkah Untuk Diri Sendiri**

Agama Islam menyarankan agar nafkah untuk diri sendiri di dahulukan dari pada nafkah untuk orang lain. Diri sendiri tidak

---

<sup>43</sup>*Ibid*, h. 27.

dibenarkan menderita, karena mengutamakan orang lain,<sup>44</sup> sesuai dengan sabda Rasulullah. SAW:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ ثُمَّ بِمَنْ تَعُولُ

Artinya: “Mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada di bawah tanggung jawabmu”. (HR. Muslim, Ahmad bin Hambalin, Abu Dawud, dan Nasa’idari Jabir bin Abdullah)<sup>45</sup>

## 2. Nafkah Untuk Orang Lain Karena Hubungan Perkawinan Dan Hubungan Kekerabatan

Sebab- sebab wajibanya nafkah terhadap orang lain, terjadi di sebabkan oleh tiga hal, yaitu sebagai berikut:

- a. Hubungan masih ada hubungan kerabat/keturunan
- b. Hubungan kepemilikan
- c. Hubungan perkawinan<sup>46</sup>

### 1) Sebab hubungan kerabat/keturunan

Dalam Agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, arti dengan adanya hubungan nasab seorang dapat menerima harta seseorang. Karna hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbullah hak kewajiban. Seperti halnya dalam memberikan kewajiban

<sup>44</sup>Faisol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar*, Cetakan Ke 5, (Surabaya: Bina Ilmu, 1993), h. 3868.

<sup>45</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2017), h. 696.

<sup>46</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid Ke 4*, (Jakarta: Van Hoe Vehoever, 2009), h. 1281.

memberikan nafkah baik kepada istri maupun kepada suami, kepada anak atau kedua orang tua.

Ahli fiqih menetapkan: “Bahwa hubungan kekeluargaan yang menyebabkan nafkah adalah keluarga dekat yang membutuhkan pertolongan. “Maksudnya keluarga yang hubungannya langsung ke atas dan ke bawah, seperti orang tua kepada anak-anaknya, anak kepada orang tuanya bahkan kakek dan saudara-saudaranya yang dekat lainnya apabila mereka tidak mampu sekedar mencukupi keperluan hidupnya.

Imam Hanafi berpendapat, “Wajib nafkah kepada kaum kerabat oleh kerabat yang lain hendaknya hubungan kekerabatan antara mereka itu merupakan hubungan yang menyebabkan keharaman nikah”.<sup>47</sup>

Jadi, suatu keluarga yang hubungan vertikal langsung ke atas dan kebawah, mewajibkan seorang memberi nafkah. Hal ini sesuai dengan pendapat Imam Malik: “Nafkah di berikan oleh ayah kepada anak, kemudian anak kepada ayah dan ibu”.<sup>48</sup> Imam Malik beralasan dengan Firman Allah dalam surat Al-Israa ayat (23):

---

<sup>47</sup>Muhammad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Thalak)*, (Jakarta: Amzah 2011),. h.210.

<sup>48</sup>Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.XVII No. 66 (Agustus 2015), h.384.

﴿ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنًا ۚ إِنَّكَ إِنَّمَا  
 يَبْلُغُنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ  
 وَلَا تَنْهَرَهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۝ ﴾

Artinya: “Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia mengucapkan kata ah kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu.<sup>49</sup>

Meberikan nafkah kepada karib atau kerabat merupakan kewajiban bagi seseorang, apabila mereka cukup mampu dan karib kerabatnya itu benar-benar memerlukan pertolongan karna miskin dan sebagainya. Kerabat yang lebih dekat berhak disantuni dan di nafkahi dari pada kerabat yang jauh, meskipun kedua-duanya memerlukan bantuan yang sekiranya harta yang dinafkahi ituhanya mencukupi buat salah seorang di antara keduanya.

Berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Israa ayat (26):

---

<sup>49</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.234.



وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ

تَبَذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.<sup>50</sup>

Dari ayat tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga-keluarga yang dekat serta kepada orang miskin.<sup>51</sup>

## 2) Sebab pemilik

Seorang wajib memberikan nafkah terhadap yang dimilikinya, seperti hamba sahaya dan binatang piaraan, harus diberikan makan dan minuman yang bisa menopang hidupnya. Bila seorang tidak mau melaksanakannya, maka hakim boleh memaksa seorang tersebut untuk memberikan nafkah kepada binatang piaraan dan pelayannya.

Imam Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah, binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya. Jadi apabila seorang memiliki binatang piaraan, diwajibkan memberi makan

<sup>50</sup> *Ibid*, h.112

<sup>51</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.XVII No. 66 (Agustus 2015), h.384.

menjaganya jangan sampai dibebani lebih dari semestinya, begitu pula kepada hamba sehayat atau pelayan.<sup>52</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tidak dibenarkan seseorang membebankan tugas-tugas berat yang tidak sanggup dikerjakan terhadap sesuatu yang dimilikinya.

Apabila ada orang yang mengurung binatang-binatang tanpa memberi makanan dan minuman, maka orang tersebut akan mendapat siksaan dari Allah atas perbuatannya itu, karena hal tersebut merupakan suatu penyiksaan terhadap binatang tersebut. Oleh karena itu seseorang yang tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya, maka hakim boleh memaksanya untuk memberikan nafkah atau menyuruh untuk menjualnya atau melepaskannya. Bila tetap tidak mau melaksanakannya, hakim boleh bertindak dengan tindakan yang baik.<sup>53</sup>

### 3) Sebab perkawinan

Perkawinan adalah merupakan salah satu kebutuhan naluri manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam melakukan hubungan biologis dan berkeluarga. Islam sangat menyukai perkawinan, hal ini terlihat dengan banyak sekali

---

<sup>52</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2017), h. 697.

<sup>53</sup>*Ibid*, h. 698.

ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadist-hadis nabi yang menjelaskan tentang ajaran untuk kawin, karna perkawinan itu dapat menentramkan jiwa, menutup pandangan mata dari segala yang dilarang Allah dan untuk mendapatkan kasih sayang suami istri yang dihalalkan oleh Allah SWT, serta untuk memperkuat ikatan kasih sayang sesama mereka.

Terjadinya perkawinan disebabkan timbulnya rasa kasih sayang, rasa cinta mencintai yang akhirnya timbul keinginan untuk saling memiliki. Maka dalam hal ini bila ada seorang pria dan seorang wanita yang berkeinginan untuk hidup bersama, mereka terlebih dahulu harus melakukan akad nikah yang merupakan hal terpenting dalam suatu perkawinan.<sup>54</sup>

Perkawinan merupakan salah satu sebab wajibnya nafkah, karena dengan adanya akad nikah, seorang istri menjadi terkait dengan suaminya, mengasuh anak serta mengatur rumah tangga dan lain sebagainya. Maka semua kebutuhan istri menjadi tanggungan suaminya.

Jadi berdasarkan hadits tersebut di atas, jelaslah bahwa seorang suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya, memenuhi kebutuhan hidupnya selama ikatan suami istri (perkawinan) masih berjalan, si istri tidak Nusyuz dan tidak ada sebab lain yang akan menyebabkan terhalangnya nafkah.

---

<sup>54</sup> M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam Edisi Pertama*, Cetakan Ke 2, (Jakarta; Siraja, 2003), h.79.

Begitu pula sebaliknya si istri wajib mematuhi perintah suaminya dan taat kepada suaminya, karena dengan adanya akad bikah menimbulkan hak dan kewajiban antara mereka.

Kewajiban memberikan nafkah tersebut tidak saja dikhususkan untuk isteri, namun terhadap orang tuanya berhak dinafkahi jika orang tua miskin. Bahkan kepada anak-anak yatim dan anak-anak terlantar, seandainya mampu dan memungkinkan.<sup>55</sup>

Sesuai dengan penjelasan tersebut di atas, seorang suami wajib memberi nafkah kepada isterinya yaitu mencukupi hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan lain sebagainya. Kebutuhan rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:

1. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari
2. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak
3. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak.<sup>56</sup>

Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka bapak tidak wajib memberikan nafkah kepada anak itu. Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masi menuntut ilmu,

---

<sup>55</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2017), h.223.

<sup>56</sup>Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Amani, 2011), h. 110.

maka kewajiban memberikan nafkah terhadap dirinya tidak gugur, hal ini sesuai dengan pendapat Imam Hanafi.”Anak yang telah dewasa, jika ia masi menuntut ilmu pengetahuan, maka bapak wajib memberi nafkah”.<sup>57</sup>

Jika ditelusuri berdasarkan pada ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa mengenai belanja dan pendidikan merupakan hak dan kewajiban dari orang tua khususnya suami kepada anaknya yang sudah diatur jelas dalam Pasal 45 sampai 49 dengan ketentuan Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak :<sup>58</sup>

Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah istri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam satu rumah tangga. Firman Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat (34):

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ ۚ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 120.

<sup>58</sup> Abdul Qodir Zaelani, “Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan”, ASAS, Vol. 6, No. 2, (Juli, 2014), h. 32.

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya”.<sup>59</sup>

Dalil tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang suami menjadi kepala rumah tangga disebabkan perkawinan. Oleh karna itu suami wajib menanggung kebutuhan suami istri dan anak-anak menurut kesanggupanya, supaya anak-anaknya tidak hidup terlantar yang tidak memiliki tempat tinggal.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h. 455.

<sup>60</sup> Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Amani, 2011), h. 112.

### b. Ketentuan Jumlah Kadar Nafkah

Mengenai jumlah kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Quran maupun Al-Hadits, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan, begitu juga kepada anak-anak terlantar Al-Quran dan Al-Hadits hanya memberikan gambaran umum saja, seperti firman Allah dalam surat Ath-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”<sup>61</sup>

Apabila ketentuan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya.

Apabila dikaji lebih jauh, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an sangat cocok dan sesuai dengan sifat suami istri yang saling mencintai dan saling menyayangi, antara

---

<sup>61</sup>Ibid, h. 357.

satu sama lainya saling memberi pengertian baik dari segi kelebihan maupun dari segi kekurangan masing-masing.

Para ulama telah sepakat mengenai wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masi berselisih paham

Imam Abu Hanafi, Malik dan Ahmad berpendapat: "Nafkah itu diukur dan dikadarkan dengan keadaan".

Imam Asy-Syafi'i berpendapat: "Nafkah istri diukur dengan ukuran hukum syara dan yang di'itibarkan dengan keadaan suami, orang kaya memberi dua mud sehari, orang yang sedang memberikan satu setengah mud sehari, dan bagi orang yang miskincukup memberi satu mud sehari" Satu *mud* setara dengan (1,25 kilogram, seperti gendum, beras dan lainnya). Jadi para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami istri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut.<sup>62</sup>

Jika istri tinggal serumah dengan suaminya, maka suami yang menanggung dan mengurus segala keperluan istrinya. Kemudian si istri tidak berhak memintak nafkah dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya. Jika seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya tanpa alasan-alasan yang jelas, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah bagi dirinya. Hakim boleh memutuskan jumlah

---

<sup>62</sup>Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2017), h. 443.



nafkah untuk istri, dan suami wajib membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istrinya itu benar.<sup>63</sup>

Oleh karna itu, kadar nafkah yang paling baik diberikan suami kepada istri sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, yaitu harus melihat kedudukan sosial dan tingkat kemampuan suami istri. Jadi tidak berlebih-lebihan sehingga memberatkan suami dan juga tidak terlalu sedikit, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami.

Begitu juga dengan nafkah terhadap anak terlantar. Para ulama sepakat mengenai wajibnya nafkah terhadap anak terlantar, namun mengenai banyak (kadar) nafkah yang harus diberikan kepada mereka tidak dijelaskan secara tegas, baik di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits banyak ayat wajibnya zakat, karena zakat merupakan salah satu usaha dalam membantu fakir miskin dan anak-anak yatim terlantar, tetapi besar kecilnya yang harus diberikan kepada mereka tidak ditentukan. Pemberian tersebut hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sesuai dengan kesanggupan setiap muslim.

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karna nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup>M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam Edisi Pertama, Cetakan Ke 2*, (Jakarta; Siraja, 2003), h. 89.

<sup>64</sup>*Ibid*, h.395-397.

## 5. Gugurnya Kewajiban Suami Memberi Nafkah

Pada dasarnya nafkah itu diwajibkan sebagai penunjang kehidupan suami istri. Bila kehidupan suami istri berada dalam keadaan biasa, di mana maupun istri sama-sama melaksanakan kewajiban yang ditetapkan agama maka tidak akan ada masalah dalam rumah tangga. Namun bila salah satu pihak tidak menjalankan kewajibannya, maka apa ia berhak menerima hak yang sudah ditentukan, seperti istri tidak menjalankan kewajibannya apakah ia berhak menerima nafkah dari suaminya; sebaliknya suami yang tidak menjalankan kewajibannya, apakah ia berhak menerima pelayanan dari istrinya: menjadi pembicaraan di kalangan ulama

Dalam hal ini istri tidak menjalankan kewajibannya yang disebut dengan *nusyuz*, menurut jumhur ulama suami tidak wajib memberi nafkah dalam masa *nusyuz* nya itu. Alasan jumhur ulama (Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali) adalah bahwa nafkah yang diterima istri itu merupakan imbalan dari ketaatan yang diberikan kepada suami. Istri yang *nusyuz* hilang ketaatannya dalam masa itu, oleh karna itu ia tidak berhak atas nafkah selama masa *nusyuz* dan kewajiban itu kembali dilakukan setelah *nusyuzi* itu berhenti.<sup>65</sup>

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang *nusyuz* tidak gugur haknya dalam menerima nafkah. Alasannya ialah nafkah itu diwajibkan atas dasar akad nikah bukan atas dasar ketaatan. Bila sewaktu-waktu ia tidak taat kepada suaminya atau *nusyuz* ia hanya dapat diberi pengajaran,

---

<sup>65</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*, (Surakarta: Pustaka Arafah, 2017), h. 557.

atau pisah tempat tidur atau pukulan yang tidak menyakitkan, sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيَتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

*Artinya: "Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan Nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya. Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik. Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya".<sup>66</sup>*

<sup>66</sup> Dapertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), h.122.

Bila suami tidak menjalankan kewajibannya dalam memberikan nafkah, dapatkah istri menarik ketaatannya dengan cara antara lain tidak mau digauli suaminya, juga menjadi pembicaraan di kalangan ulama, jumhur ulama berpendapat bahwa istri yang tidak mendapat nafkah dari suaminya, berhak tidak memberikan pelayanan kepada suaminya, bahkan boleh untuk memilih pembatalan perkawinan atau *fasakh*.

Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa istri yang tidak menerima nafkah dari suaminya tetap menjalankan kewajibannya sebagai istri dan tidak boleh menolak permintaan suami untuk digauli. Istri harus sabar menerima kenyataan ketidak mampuan suaminya itu.<sup>67</sup> Jadi, hak istri untuk menerima nafkah menjadi gugur apabila:

- a. Akad nikah mereka menjadi batal atau *fasid* (rusak), seperti dikemudian hari ternyata kedua suami itu mempunyai hubungan *mahram* dan sebagainya, maka istri wajib mengembalikan nafkah yang telah diberikan suaminya nafkah jika nafkah itu diberikan atas dasar keputusan pengadilan. Bila nafkah itu diberikan tidak berdasarkan keputusan pengadilan, maka pihak istri tidak wajib mengembalikannya.
- b. Istri masih baligh dan ia masih tetap dirumah orang tuanya. Menurut Abu Yusuf istri berhak menerima nafkah dari suaminya jika istri telah serumah dengan suaminya, karena dengan serumah itu berarti istri telah terikat di rumah suaminya.

---

<sup>67</sup>Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet II, (Surabaya: Al-Iklas, 1993), h. 26.

- c. Istri dalam keadaan sakit. Karna itu ia tidak bersedia serumah dengan suaminya. Tetapi jika ia bersedia serumah dengan suaminya ia tetap berhak mendapatkan nafkah.
- d. Bila istri melanggar larangan Allah yang berhubungan dengan kehidupan suami istri, seperti meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizin suami, berpergian tanpa izin dan tanpa disertai *mahram*, dan sebagainya.
- e. Bila istri *nisyuz*, yaitu tidak lagi melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai istri.<sup>68</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Rumah Tangga**

### **1. Hak Bersama Suami dan Istri**

Jika suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya, lantas kedepannya akan menciptakan ketentraman serta ketenangan hati, sehingga amat sempurna nya kehidupan dalam berumah tangga, sehingga ketentuan dari hak bersama sendiri diantaranya:

- a. Suami dan istri dihalalkan bergaul untuk mengadakan hubungan seksual yang sifatnya secara timbal balik.
- b. Saling untuk mendapatkan waris dalm dan selama proses perkawinan tersebut.
- c. Suami wajib memberikan nafkah kepada istri baik berupa nafkah lahir dan batin, sedangkan bagi istri wajib memberikan kebutuhan nafkah bagi suami berupa nafkah batin berupa melayani suami dengan baik.<sup>69</sup>

---

<sup>68</sup>*Ibid*, h 27.

## 2. Hak dan kewajiban suami terhadap istri

Suami selaku kepala keluarga di dalam sebuah kehidupan berumah tangga, suami memiliki sebuah kewajiban yang sangat amat besar, lantas kewajiban suami terhadap istri dan anak sendiri ialah sebagai berikut:

- a. Memelihara, memimpin keluarga lahir dan batin serta bertanggung jawab atas keselamatan dan kesejahteraan
- b. Memberi nafkah berupa makanan, minuman, pakaian, perumahan menurut kemampuan serta melindungi dari segala gangguan dan segala kesulitan
- c. Membantu istri dalam tugas sehari-hari terutama dalam mengasuh dan mendidik anak
- d. Sabar atas kekurangan dari istri dan berusaha mengisi kekurangan tersebut dengan penuh cinta dan kasih sayang.

## 3. Hak dan Kewajiban Istri terhadap Suami

Tugas pokok dari seorang istri ialah mendorong suami agar lebih berdaya guna menyukseskan pembangunan dalam bidang kekokohan keluarga, lantas dapat disimpulkan bahwa kewajiban istri terhadap suami ialah sebagai berikut:

- a. Membantu suami dalam keutuhan bahtera rumah tangga
- b. Membantu suami dalam menjaga kesejahteraan keluarga
- c. Menjaga kehormatan, berbakti serta tulus mencintai suami.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 155.

<sup>70</sup> Muhammad Amin, *Membina Generasi Qurani*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), h. 123.

### C. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu merupakan acuan terhadap penelitian selanjutnya, dimana penelitian tersebut dipergunakan untuk dilakukan komparasi (perbandingan) hasil penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan landasan dalam sebuah penelitian diantaranya dapat disajikan di dalam tabel di bawah ini sebagai berikut.

**Tabel 1.**  
**Tinjauan Pustaka**

No	Nama Tahun Judul Penelitian	Variable dan Indikator atau Fokus penelitian	Hasil Penelitian	Unsur Perbedaan
1	Chusnul Chotimah, (2018), dengan judul Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir	Untuk mengetahui apa hukum Islam dan hukum positif terhadap suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang berkarir dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan hukum Islam dan hukum positif tentang suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir	Di dalam hukum Islam dan hukum positif, bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri, apabila istri bekerja membantu suami mencari nafkah untuk keluarganya, maka nafkah tersebut tidak mengugurkan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Dijelaskan dalam hukum Islam dan hukum positif bahwasanya istri yang bekerja tetap berkewajiban menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, yang mana kewajibannya adalah mengurus rumah tangga.	Untuk mengetahui apa saja dalam hukum Islam dan hukum positif tentang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang berkarir dan untuk mengetahui persamaan antara hukum Islam dan hukum positif

2	<p>Agus Supriyadi, (2016), dengan judul Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana istri menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga apabila dia juga berperan sebagai pencari nafkah utama dalam keluarganya juga mendominasi kehidupan keluarganya baik dari sisi ekonomi maupun kehidupan</p>	<p>Peran perempuan dalam rumah publik membawa perubahan terhadap perannya sebagai istri dalam rumah tangga, perubahan tersebut meliputi perubahan pola pengasu anak, pembagian pekerjaan dalam keluarga, pengelolaan keuangan, dan mengambil keputusan. Perempuan yang masuk ke ranah publik akan membawa dampak ekonomi, sosial dan psikologi. Dampak ekonomi yang ditimbulkan seperti penambahan kepemilikan asset, investasi keluarga, penambahan perabotan rumah tangga, perubahan lauk pauk, dan renovasi rumah , sedangkan untuk dampak sosial yang timbul yaitu berkurangnya intensitas mengikuti kegiatan sosial dan keagamaan dan intensitas interaksi dengan tetangga. Dampak terakhir yang dirasakan yaitu dampak psikologi, anak-anak perempuan yang bekerja menjadi mandiri, karena segala sesuatu dilakukan dengan sendiri.</p>	<p>Bahwa peran perempuan dalam rumah membawa perubahan terhadap perannya sebagai istri dalam rumah tangga, perubahan tersebut meliputi perubahan pola pengasu anak, pembagian pekerjaan dalam keluarga, pengelolaan keuangan, dan mengambil keputusan. Perempuan yang masuk ke ranah publik akan membawa dampak ekonomi, sosial dan psikologi.</p>
---	--	--	---	--



3	M. Ulil Azmi, (2015), Pemberian Nafkah IDDAH Dalam Cerai Gugat (Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt. G/2010/PA. JS)	Untuk mengetahui pandangan hukum Islam dan hukum positif tentang hak nafkah iddah bagi istri dalam cerai gugat dan analisis pertimbangan dan putusan hakim yang memerintahkan tergugat untuk memberi nafkah iddah kepada pengugat berdasarkan putusan perkara No. 1445/Pdt. G/2010/PA.JS.	Pada dasarnya nafkah iddah hanya berlaku pada kasus cerai thalak. Tapi hakim dapat membebankan kepada pihak tergugat untuk memberikah nafkah iddah kepada penggugat berdasarkan pertimbangan tertentu. Dalam hukum Islam, pemberian nafkah <i>iddah</i> dan <i>mut'ah</i> pada thalak <i>Ba'it</i> didasarkan pada imam Hanafi. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut beriddah karna perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.	Bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut beriddah karna perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.
---	---	---	--	--

*Sumber: Jurnal dan Skripsi*

**Keterangan:**

1. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Chotimah

Persamaan: Sama-sama untuk mengetahui dalam hukum Islam bahwasanya nafkah tetap menjadi kewajiban mutlak suami yang harus diberikan kepada istri<sup>71</sup>

Perbedaan: Untuk mengetahui apasaja dalam hukum Islam dan hukum positif tentang suami yang tidak memberi nafkah kepada istri yang berkarir dan untuk mengetahui persamaan antara hukum Islam dan hukum positif

2. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Agus Supriyadi

Persamaan: Sama-sama untuk mengetahui bagaimana istri menjalankan perannya dalam mengurus rumah tangga<sup>72</sup>

Perbedaan: bahwa peran perempuan dalam rumah membawa perubahan terhadap perannya sebagai istri dalam rumah tangga, perubahan tersebut meliputi perubahan pola pengasuh anak, pembagian pekerjaan dalam keluarga, pengelolaan keuangan, dan mengambil keputusan. Perempuan yang masuk ke ranah publik akan membawa dampak ekonomi, sosial dan psikologi.

---

<sup>71</sup>Chusnul Chotimah, “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Rden Intan Lampung, 2018)

<sup>72</sup>Agus Supriadi, “Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2016)

3. Persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Ulil Azmi

Persamaan: Sama-sama untuk mengetahui dalam pandangan hukum Islam dan tentang hak nafkah bagi istri dalam cerai gugat<sup>73</sup>

Perbedaan: Bahwa wanita tersebut berhak nafkah dan tempat tinggal secara bersama, kecuali jika wanita tersebut beriddah karna perpisahan disebabkan pelanggaran istri, seperti istri murtad setelah bercampur atau tindakan istri menodai kehormatan mertua seperti orang tua suami atau saudara-saudaranya, istri hanya berhak tempat tinggal dan tidak berhak nafkah.

---

<sup>73</sup>M. Ulil Azmi, "Pemberian Nafkah IDDAH dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt. G/2010/PA.JS". (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015)

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid Ke 4*, Jakarta: Van Hoe Vehoeve, 2009.
- Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim, Panduan Hidup Menjadi Muslim Kaffah, Cet 1*, Surakarta: Pustaka Arafah, 2017.
- Abdurahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: CV, Akademika Pressindo, 1995, cet. Ke-2.
- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana), 2003.
- Abidin Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Uli Press, 1990.
- Beni Ahmad Saebeni, *Fikih Munakahat*, Bandung: Amani, 2011.
- Dapertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, Cetakan 1*, Jakarta: 2001.
- Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Kedua Edisi IV*, Jakarta: PT Gramedia PustakaUtama, 2011.
- Davit Mulyadi, *Kbbi.Kemdikbud.go.id*, Jakarta: Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia, 2019.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Faisol Bin Abdul Aziz Al-Mubarak, *Nailul Authar, Cetakan Ke 5*, Surabaya: Bina Ilmu, 1993.
- Mardalis, *Hadis Ahkam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam Edisi Pertama, Cetakan Ke 2*, Jakarta: Siraja, 2003.

- Muhammad Azzam Abdul Aziz Dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Thalak)*, Jakarta :Amzah 2011.
- Muhammad Bagira Al-Habsy, *Fiqih Praktis Menurut Al-quran, As Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, Bandung: Mizan, 2002.
- Muhammad Iqbal, *Hukum Islam Indonesia Moderen*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2009.
- Muhammad Amin, *Membina Generasi Qurani*, (Jakarta: Kalam Mulia), 1994.
- Muhammad Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, cet II, Surabaya: Al-Iklas, 1993.
- Noor Syamsuddin, Mutmainah Mutia, *Perkawinan Yang Di Dambakan*, Jakarta: An-Nuur Press, 2009.
- Nuruddin Amirul dan Taringan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda Dalam Perkawinan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- RusydIbnu, *Terjemahan Biyadatu'lMujtahid, AsySyifa*: Cetakan kedua, Semarang: 2010.
- Slamet, *Belajardan Faktor-faktor Yang Mempengaruhinya*, Jakarta: Renika Cipta, Edisi Revisi, 2003.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Syekh Muhammad Bin Umar Anwar, *Terjemahan Syara Ukudullul Ujian Etika Berumah Tannga*, Jakarta: Pustaka Amani, 2000.
- Perpustakaan RI, *Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974*, Yogyakarta: New Merah Putih, 2009.
- Wahab Az-Zuhaili, *Fikih Al-Islam WaAdillatuhu*, Jakarta: GemaInsani, 2011.

## **B. Jurnal dan Skripsi :**

- Abdul Qodir Zaelani*, "Pola Asuh Anak dalam Perspektif Yuridis dan Psikologi Pendidikan", ASAS, Vol. 6, No. 2, (Juli, 2014).

*Agus Supriadi*, “Peran Istri Yang Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Utama Didalam Keluarga”. (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung), 2016.

*Chusnul Chotimah*, “Analisis Hukum Suami Yang Tidak Memberi Nafkah Terhadap Istri Yang Berkarir”. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Rden Intan Lampung), 2018.

*Ibnu Rozali*, “Konsep Memberi Nafkah Bagi Keluarga Dalam Islam”, Raden Fattah, Vol. 6, No. 2, 2017.

*Marly Chandra*, “The Penology of Islamic Criminal Law”, Al-Adalah, Vol 15, Nomor 2, 2018.

*M. Ulil Azmi*, “Pemberian Nafkah IDDAH dalam Cerai Gugat Analisis Putusan Perkara No. 1445/Pdt. G/2010/PA.JS”. (Skripsi, Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah), 2015.

*M. Quraish Shihab*, “Tafsir al-Misbah”, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002.

*Syamsul Bahri*, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. XVII No. 66 Agustus 2015.

### **C. Wawancara :**

Wawancara Dengan Keluarga Bapak “A”, Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 10 Oktober 2020.

Wawancara Dengan Keluarga Bapak “D”, Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 15 Juni 2020.

Wawancara Dengan Keluarga Bapak “J”, Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 1 mei 2020.

Wawancara Dengan keluarga bapak “U”, Tanjung Baru Timur, Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, 2 Mei 2020.

Wawancara Sekertaris Lurah Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, 19 Mei 2020.



**PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

Jalan Basuki Rahmat No.21 Telp. (0721) 481544 Fax. (0721) 481304

**TELUK BETUNG**

**REKOMENDASI PENELITIAN / SURVEI DI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

**NOMOR : 070 / 859 / III / VI.07 / 2020**

- D A S A R** : 1. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;  
3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
- MEMBACA** : Surat Permohonan Dekan Fakultas Syariah Universitas Radin Intan Lampung Nomor : B. 706/Un.16/DS/PP.009/4/2020 tanggal. 15 April 2020 perihal Permohonan Izin Penelitian
- MEMPERHATIKAN** : Proposal Skripsi

**MEREKOMENDASIKAN :**

Nama : **Andika Aditia Putra / 1621040049**  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Baru Timur, 12 April 1999  
Alamat : Dusun III Tanjung Baru Timur Kab. Lampung Utara  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Lampung  
Tujuan : Mengadakan Penelitian dalam Rangka Skripsi  
Lokasi Penelitian : Desa Tanjung Baru Timur Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara  
Judul Penelitian : **"Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Naskah oleh Istri (Studi pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)"**  
Waktu yang diberikan : 20 April s/d 20 Juni 2020

**Dengan ketentuan :**

1. Rekomendasi ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung.
4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.
5. Yang bersangkutan harus memenuhi syarat serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Dikeluarkan di : Bandar Lampung  
Pada tanggal **21** April 2020

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

BADAN KESBANG &  
POLITIK DAERAH

**FITTER SYAHBOEDIN, S.E., M.M**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19600810 199002 1 001

**Tembusan :**

1. Bupati Lampung Utara  
Cq. Kepala Kesbang dan Politik\*
2. Rektor Universitas Raden Intan Lampung  
Cq. Dekan Fakultas Syariah



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA

## BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 01 Telp. (0724) 23160 Fax. (0724) 23160 Kotabumi – Lampung Utara

### REKOMENDASI PENELITIAN/SURVEI

Nomor : 070 / 143 / 40-LU / 2020

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
  2. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
  3. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor : 07 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara;
  4. Surat Permohonan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syari'ah Nomor: B.706Un.16/DS/PP.009/4/2020 Tanggal, 15 April 2020 Tentang: Permohonan Izin Riset.

### DENGAN INI DIBERIKAN REKOMENDASI KEPADA :

- Nama / NIM : **ANDIKA ADITIA PUTRA /1621040049**
- Jabatan : Mahasiswa
- Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung
- Lokasi : Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara
- Lamanya : 1 ( Satu ) Bulan
- Peserta : -
- Penanggung jawab : **Dekan. Fakultas Syari'ah**
- Maksud dan tujuan : Mengadakan penelitian dalam Rangka Penyusunan Skripsi.
- Judul penelitian : **"Pandangan Hukum Islam Tentang Tuntutan Naskah Oleh Istri(Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara) "**
- Catatan :
1. Rekomendasi ini di terbitkan untuk kepentingan Penelitian;
  2. Tidak dibenerkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas;
  3. Melaporkan hasil Penelitian/Survei kepada Bupati Lampung Utara cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Utara;
  4. Surat Rekomendasi ini di cabut kembali apabila Pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Dikeluarkan di Kotabumi

Pada tanggal, 04 Agustus 2020

Plt. KEPALA BADAN KESBANG & POLITIK  
KABUPATEN LAMPUNG UTARA



Tembusan : disampaikan kepada yth ;

1. Bapak Bupati Lampung Utara (sebagai laporan)
2. Camat Bukit Kemuning Kab. LU
3. Kepala Desa Tanjung Baru Timur Kec. Bukit Kemuning
4. Dekan. Fakultas Syari'ah
5. Arsip





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
**DESA TANJUNG BARU TIMUR**  
**KECAMATAN BUKIT KEMUNING KABUPATEN LAMPUNG UTARA**  
*Jl. Sumber Jaya Desa Tanjung Baru Timur Kec. Bukit Kemuning Kab. Lampung Utara KP. 34556*

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor:470/001/SK/TBT/VIII/2020**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara, memberikan izin kepada:

Nama : **ANDIKA ADITIA PUTRA**  
Jabatan : Mahasiswa  
NPM : **1621040049**  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan : **KONSENTRASI ILMU HUKUM**

Untuk pelaksanaan tugas **Riset/Penelitian**, pandangan Hukum Islam tentang Tuntutan Nafkah Oleh Istri (Studi pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara).

Sesuai Surat Permohonan Izin Riset dari Universitas Islam Negeri UIN Raden Intan Lampung

No: B.1572/Un.16/DS/PP.009/9/2019 Tanggal 30 September 2019.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Tanjung Baru Timur, 04 Agustus 2020

Kepala Desa

**SUMIATI**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN  
NAFKAH OLEH ISTRI  
(Studi Pada Desa Tanjung Baru Timur Kecamatan  
Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Fakultas Syariah  
UIN Raden Intan Lampung**

**Oleh :**

**Andika Aditia Putra  
NPM : 1621040049**

*Acc v/d catat  
di catat perbaiki lengkap  
5/2 2021*

**Jurusan : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga)**

*Acc y/d catat  
5/2/2021*



*acc catat  
5/2/21  
Pegasi II*

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1442H/2021M**



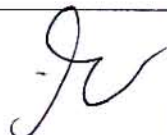

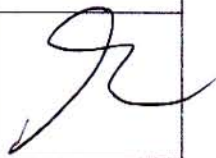




**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat: Jl. Let. kol.Hi. Ednro Suratmin Sukarame Telp (0721) 703260 Bandar Lampung*

**BLANGKO KONSULTASI SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Andika Aditia Putra  
NPM : 1621040049  
Jurusan : Ahwal-Syakhshiyah (Konsentrasi Ilmu Hukum)  
Fakultas : Syariah  
Pembimbing I : Sucipto, S.Ag., M.Ag  
Pembimbing II : Ahmad Burhanuddin, M.H.I  
Judul Skripsi : **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG TUNTUTAN  
NAFKAH OLEH ISTRI (Studi Pada Desa Tanjung Baru  
Timur Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung  
Utara)**

No	TANGGAL KONSULTASI	KETERANGAN	PARAF PEMBIMBING	
			I	II
1.	07 Februari 2020	ACC Proposal Untuk di Seminarkan		
2.	02 Maret 2020	Bimbingan Proposal setelah seminar proposal ke pembimbing I		
3.	04 Maret 2020	ACC Pembimbing II pada BAB I		
4.	05 Maret 2020	ACC Pembimbing I pada BAB I		
5.	10 September 2020	ACC Pembimbing II pada BAB II-V		

6.	17 September 2020	ACC untuk dimunaqosyahkan oleh Pembimbing II		
7.	30 November 2020	ACC untuk dimunaqosyahkan oleh Pembimbing I		

Mengetahui,

Pembimbing I



**Sucipto, S.Ag., M.Ag**  
**NIP. 196612271995031001**

Pembimbing II



**Ahmad Burhanuddin, M.H.I**  
**NIP.**